



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 71 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor

7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1

- (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
 7. Rencana Strategis Badan yang selanjutnya disebut Renstra Badan adalah dokumen perencanaan Badan untuk periode 5 (lima) tahun.
 8. Rencana Kerja Badan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Badan adalah dokumen perencanaan Badan Tahun 2022.
 9. Rencana Kerja dan Anggaran Badan yang selanjutnya disebut RKA Badan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan badan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Badan disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup badan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Badan disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Badan Tahun 2022; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Tahun 2022.

Pasal 4

- (1) Renja Badan berpedoman pada rancangan akhir Renstra Badan Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022.
- (2) Renja Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Badan tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Badan tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Badan tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Badan tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Badan dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan.
- (4) Renja Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kepala Badan menjaga kesesuaian antara Renja Badan dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022

Pasal 6

- (1) Renja Badan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Badan Tahun 2021;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Badan.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Badan;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Badan; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Badan.
- (3) Kepala Badan menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikut.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Badan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Badan menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :

- a. Perubahan RKPD Tahun 2022; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan sampai dengan triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 16 September 2022



Diundangkan di Painan
Pada tanggal 16 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2022



2022

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan. Dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja Tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Rencana Kerja Tahun 2022 ini disusun dalam upaya memberikan arah dan pedoman untuk rencana tindak lanjut kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang merupakan juga solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Badan Kesatuan dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Painan, Agustus 2022
Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan



HARDI DARMA PUTRA, S.H.M.Si
NIP. 19670901 198602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU.....	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENTRA PERANGKAT DAERAH	9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	35
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	38
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	57
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	57
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	58
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	66
BAB V PENUTUP.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa seluruh Perangkat Daerah Wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun yang merupakan hasil kesepakatan seluruh stakeholder. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik dimana harus ada keseimbangan antara perencanaan teknokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* serta *top-down*.

Dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan meneruskan arah pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta penyusunan kebijakan lingkungan Badan Kasatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022. Disamping itu, Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan. Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah “Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan dinamis”. Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja dan review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 182 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2022 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan dan Penerapan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang Kasatuan Bangsa dan Politik;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Menunjukkan keterikatan antara pencapaian prestasi kinerja yang akan di capai;
3. Menentukan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah;
4. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Menunjukkan keterikatan antara pencapaian prestasi kinerja yang akan dicapai.
6. Meningkatkan efisiensi dan transparansi penganggaran.
7. Meningkatkan flexibelitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2023. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan untuk mengkaji hasil dari pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja OPD dibandingkan dengan capaian target kinerja Rencana Strategis OPD.

1. Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - 1.1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan jumlah anggaran Rp. 141.537.628 (Seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah). Sub Kegiatan pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang tidak

memenuhi target kinerja program ini tidak tercapai karena tidak terlaksananya pemberian hibah pada Polres Pesisir Selatan berupa pengadaan alat test urin narkoba. Hal ini tidak terlaksana karena anggarannya tertampung pada perubahan anggaran, untuk proses hibah sendiri memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan administrasi.

2. Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - 2.1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan jumlah anggaran Rp. 73.462.004 (Tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu empat rupiah),-
 - 2.2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan jumlah anggaran Rp. 855.000,- (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah),-
 - 2.3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan jumlah anggaran Rp. 1.443.790.819 (Satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah),-
3. Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - 3.1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan jumlah anggaran Rp. 193.989.838,- (Seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah),- dengan capaian kinerja lebih dari 100 % dengan indikator terbitnya rekomendasi penelitian dengan target 50 dokumen dan realisasi 143 dokumen.
4. Faktor – faktor yang menyebabkan tidak terpenuhi capaian capaian target kinerja.

Adapun faktor – faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya capaian target kinerja yaitu :

1. Proses pembukaan rekening di Polres Pessel harus meminta persetujuan dari Mapolda Sumbar.
2. Dana Hibah ini muncul pada perubahan anggaran.
5. Implikasi yang timbul terhadap capaian target program

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang berupaya dalam pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan dengan upah, konflik lahan dan sumber daya alam. Selain itu juga akan diupayakan penguatan kerukunan antar umat beragama dan penganut aliran kepercayaan dalam menjaga ketahanan bangsa.

Memperkuat karakter kebangsaan, pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi pancasila, pembauran kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara serta pembangunan karakter bagi masyarakat.

Optimalisasi pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja. Koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, penegak hukum serta tokoh-tokoh masyarakat perlu untuk di optimalkan guna mencegah merebaknya penyakit masyarakat dan kenakalan remaja, termasuk didalamnya pencegahan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, tawuran, perjudiaan serta pelecehan seksual.

Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat perlu dilakukan optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi. Selain itu penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

Pemantapan implementasi reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah.

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran terhadap faktor penyebab tersebut.
 - Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Nasional dan fasilitasi/Upaya penanganan konflik sosial.
 - Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk antara lain, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Farum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TIMDU PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi.
 - Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur.
 - Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama.
 - Melaksanakan pembekalan bagi operatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Penyakit Masyarakat lainnya.
 - Meningkatkan kehidupan harmoni gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah masyarakat.

- Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik.
- Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan.

8	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang disusun	6 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji ASN dan CASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	12 Bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	12 Bulan	100%

8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honor ASN yang dibayarkan	12 Bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	12 Bulan	100%
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	1 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Orang	1 Orang	100%
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	7 Dokumen	7 Dokumen	100%

8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Peneranga n Kantor yang disediakan	7 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	7 Unit	7 Unit	100%
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Buah	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Buah	20 Buah	100%
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	34 Buah	N/A	N/A	N/A	N/A	34 Buah	34 Buah	100%
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetakan yang disediakan - Jumlah Penggandaan yang disediakan	- 6 Unit - 80499 Lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	- 6 Unit - 80499 Lembar	4 Paket	100%

8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Bacaan yang disediakan (Surat Kabar) - Jumlah Publikasi yang disediakan	- 3 Media - 1 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	- 3 Media - 1 Paket	- 3 Media - 1 Paket	100%
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Pelayanan Tamu	12 Bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	12 Bulan	100%
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Laptop yang diadakan - Jumlah Printer yang diadakan	- 3 Unit - 2 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	- 3 Unit - 2 Unit	- 3 Unit - 2 Unit	100%

8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tagihan Air (PDAM), PLN, dll yang dibayarkan	12 Bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	12 Bulan	100%
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100%
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Bulan Operasional Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas - Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	- 12 Bulan - 4 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	- 12 Bulan - 4 Unit	- 12 Bulan - 4 Unit	100%
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	6 Unit	6 Unit	100%
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehab	1 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	1 Unit	100%

8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	85%	100%
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	4 Dokumen Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	100%

8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	500 Orang	500 Orang	100%
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pemahaman Politik dikalangan Masyarakat /aparatur Daerah serta Terciptanya Stabilitas politik Pemerintahan yang Kondusif di Daerah	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	85%	100%

8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Laporan Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
---	----	----	------	--	--	-----------	-----	-----	-----	-----	-----------	-----------	------

8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah - Jumlah Partai Politik yang diverifikasi untuk Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai - Jumlah Partai Politik yang Mendapat Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik	- 13 Parpol - 13 Parpol	N/A	N/A	N/A	N/A	- 13 Parpol - 13 Parpol	- 13 Parpol - 13 Parpol	100%
---	----	----	------	----	--	------------------------------------	-----	-----	-----	-----	------------------------------------	------------------------------------	------

8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Monev di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Dokumen Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	100%
---	----	----	------	----	--	---	-------------------	-----	-----	-----	-----	-------------------	-------------------	------

8	01	04			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Hasil Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	85%	100%
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Monev Ormas/LSM yang Mendapat Pembinaan	4 Dokumen Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	100%

8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Komunikasi dengan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS/LSM)	12 Bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	12 Bulan	100%
8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	85%	100%

8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Telaksana nya Kebijakan Teknis dan Pemantap an Pelaksana an Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	12 Bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	12 Bulan	100%
---	----	----	------	--	---	---	----------	-----	-----	-----	-----	----------	----------	------

8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah - Jumlah ASN dan Siswa yang Mengikuti Tes Urine untuk Penanggulan gan Penyalahgun aan Narkoba - Jumlah Dana Hibah Bantuan Penanganan Penyalahgun aan Narkoba kepada Polres Pessel - Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat - Jumlah Siswa yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Penyalahgun aan Narkotika Tingkat SLTA dan Nagari - Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI)	- 300 Siswa - 1 Paket - 200 Orang - 72 Siswa per Kecamatan - 1 Kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	- 300 Siswa - 1 Paket - 200 Orang - 72 Siswa per Kecamatan - 1 Kegiatan	- 300 Siswa - 1 Paket - 200 Orang - 72 Siswa per Kecamatan - 1 Kegiatan	100%
---	----	----	------	----	--	--	-----	-----	-----	-----	--	--	------

8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah	4 Dokumen Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	100%
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Hasil Capaian Kondusifitas Pemerintahan dalam Bidang Perlindungan Masyarakat	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	85%	100%

8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial yang Tetangani Melalui Koordinasi Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	4 Dokumen Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	100%
---	----	----	------	--	--	---	-------------------	-----	-----	-----	-----	-------------------	-------------------	------

8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah - Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Rapat-Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat at (FKDM) - Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Rapat-Rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing - Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Rapat-Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini	- 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 21 Dokumen Laporan - 100 Rekomendasi - 100 Rekomendasi	N/A	N/A	N/A	N/A	- 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 21 Dokumen Laporan - 100 Rekomendasi - 100 Rekomendasi	- 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 21 Dokumen Laporan - 100 Rekomendasi - 100 Rekomendasi	100%
---	----	----	------	----	---	---	-----	-----	-----	-----	---	---	------

8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Monev di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Dokumen Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	100%
---	----	----	------	----	---	---	-------------------	-----	-----	-----	-----	-------------------	-------------------	------

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Paeruran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Paraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perauran Bupati Pesisir Selatan Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 141 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pasal 4 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dan membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.

3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragaram, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.
5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
6. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	a. Jumlah Konflik yang Terfasilitasi			N/A	5 Rekomenda si	10 Rekomenda si	10 Rekom endasi	N/A	5 Rekomenda si	10 Rekom endasi	15 Rekom endasi	
	b. Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			N/A	N/A	1 Inovasi	1 Inovasi	N/A	N/A	1 Inovasi	1 Inovasi	
2.	Persentase Pemilu Aman, Jujur dan Adil			N/A	N/A	80%	80%	N/A	N/A	80%	80%	
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol			N/A	BB (71,8)	BB (72)	BB (72,1)	N/A	BB (71,8)	BB (72)	BB (72,1)	
4.	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Badan Kesbangpol			N/A	Memuaskan	Memuaskan	Memu askan	N/A	Memuaskan	Sangat Puas	Sangat Puas	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah.

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi pokok perhatian Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- a) Mulai melunturnya / menurunnya jiwa bela negara dan wawasan kebangsaan pada generasi yang di sebabkan oleh :
 - ✓ Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila.
 - ✓ Terjadinya globalisasi dan digitalisasi
 - ✓ Munculnya bibit-bibit fanatisme dan radikalisme
 - ✓ Masih belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan ideolog, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
- b) Masih tingginya kasus kenakalan remaja dan penyakit masyarakat yang disebabkan oleh :
 - ✓ Masih rendahnya pencegahan penyakit masyarakat
 - ✓ Masih rendahnya pengawasan penyakit masyarakat
 - ✓ Masih terbatasnya kemampuan dalam membatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba
 - ✓ Masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
- c) Masih adanya potensi gangguan terhadap kerukunan umat beragama yang disebabkan oleh :
 - ✓ Masih rendahnya tingkat penyelenggaraan penguatan kerukunan umat beragama
 - ✓ Munculnya aliran-aliran kepercayaan baru
 - ✓ Belum terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)
- d) Masih banyaknya potensi konflik ditengah masyarakat yang dipicu oleh belum optimalnya peran tim dan forum stretegis daerah dalam

mencegah dan menangani konflik dan belum akuratnya data potensi konflik.

- e) Masih rendahnya kualitas demokrasi yang disebabkan oleh :
- ✓ Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberian hak suara.
 - ✓ Rendahnya pendidikan politik terhadap masyarakat
 - ✓ Masih rendahnya pengawasan terhadap partai politik
 - ✓ Belum optimalnya peran ormas dan LSM dalam pembangunan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah

Berdasarkan hasil identifikasi resiko, permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, yang dapat menghambat pencapaian tujuan OPD baik yang bersumber dari internal maupun eksternal diantaranya :

- a. Data dan informasi terkait permasalahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kesbangpol kurang akurat.
- b. Terhambatnya pelaksanaan sosialisasi disebabkan faktor internal.
- c. Aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang tidak terpantau secara maksimal sehingga muncul ketidaknyamanan ditengah masyarakat akibat aktifitas keagamaan yang dilakukan sekelompok orang yang menyimpang dari ajaran agama.
- d. Keterlambatan pencairan bantuan keuangan partai politik yang menyebabkan pelaksanaan program kerja partai politik terganggu.
- e. Kekurangan jumlah besaran bantuan keuangan partai politik yang disalurkan menyebabkan jumlah besaran bantuan keuangan partai politik tidak sesuai regulasi.

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain:

- a. Belum optimalnya proses pengadministrasian wilayah administrasi pemerintahan dan kawasan.

- b. Belum optimalnya peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam pembinaan Nagari dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dikecamatan yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan berkurangnya pengalokasian dana kecamatan dalam mendukung peran Camat di daerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di Kecamatan yang terintegrasi diseluruh Indonesia.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap pencapaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Visi pembangunan Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima waktu yaitu tahun 2021-2026. Sesuai dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat di Dukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional. Kementerian Dalam Negeri menetapkan 9 arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategi pembangunan nasional, dari 9 arah kebijakan tersebut Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berperan dalam mewujudkan arah kebijakan yaitu pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa melalui strategi :

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi
- 2) Peningkatan kapasitas partai politik
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu
- 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan
- 5) Penghayatan, pengamalan, pembumih nilai-nilai ideologi Pancasila
- 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa
- 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan eksternal :

a) Kondisi Internal

- ✓ Ketersediaan sumber daya aparatur yang handal dan berkompotensi belum mencukupi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- ✓ Kurang proporsionalnya ketersediaan anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target kinerja
- ✓ Sarana dan prasarana aparatur belum mencukupi

b) Kondisi Eksternal

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal yaitu :

- ✓ Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik masih rendah
- ✓ Masih tingginya potensi konflik horizontal di masyarakat
- ✓ Dampak globalisasi yang dapat menurunkan nilai-nilai nasionalisme dan pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
- ✓ Masih tingginya angka kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba
- ✓ Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian dokumen.

- ✓ Kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang berbatasan dengan propinsi lain yang kaya sumber daya alam

Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- Penambahan kewenangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mejadi luas.
- Adanya dukungan dari instansi terkait dalam melaksanakan tugas – tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Adanya Peraturan PerUndang-Undangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Kekayaan sumber daya alam dan objek wisata di Pesisir Selatan sebagai sumber kekuatan perekonomian daerah
- Dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu pencegahan dan penyelesaian konflik sehingga mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD tahun 2022 terdapat perbedaan pagu anggaran dengan pagu anggaran hasil analisis kebutuhan hal ini dapat dilihat pada tabel T-C.3.1. Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Pesisir Selatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Pesisir Selatan			5,325,145,031					5,823,059,207	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	2,818,619,790	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	2,934,265,679	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	30,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	30,300,000	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang disusun	6 Dokumen	30,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang disusun	6 Dokumen	30,300,000	

2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2,047,169,792	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2,096,284,540	
a.	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Bulan Gaji ASN dan CASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	12 Bulan	1,909,536,614	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Bulan Gaji ASN dan CASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	12 Bulan	1,957,275,030	
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Bulan Pembayaran Honor ASN yang dibayarkan	12 Bulan	137,633,178	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Bulan Pembayaran Honor ASN yang dibayarkan	12 Bulan	139,009,510	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	40,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	100,000,000	
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	1 Orang	40,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	1 Orang	100,000,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Dokumen Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	298,090,738	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Dokumen Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	301,071,646	

a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan	7 Unit	10,330,292	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan	7 Unit	10,433,595	
b.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Buah	11,999,690	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Buah	12,119,687	
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	34 Buah	23,423,456	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	34 Buah	23,657,691	
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pesisir Selatan	- Jumlah Barang Cetak yang disediakan - Jumlah Penggandaan yang disediakan	- 6 Unit - 80499 Lembar	31,568,300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pesisir Selatan	- Jumlah Barang Cetak yang disediakan - Jumlah Penggandaan yang disediakan	- 6 Unit - 80499 Lembar	31,883,983	
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kabupaten Pesisir Selatan	- Jumlah Bacaan yang disediakan (Surat Kabar) - Jumlah Publikasi yang disediakan	- 3 Media - 1 Paket	10,900,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kabupaten Pesisir Selatan	- Jumlah Bacaan yang disediakan (Surat Kabar) - Jumlah Publikasi yang disediakan	- 3 Media - 1 Paket	11,009,000	
f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Bulan Pelayanan Tamu	12 Bulan	19,437,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Bulan Pelayanan Tamu	12 Bulan	19,631,370	
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	12 Dokumen	190,432,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	12 Dokumen	192,336,320	

5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Dokumen Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	45,950,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Dokumen Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	46,409,500	
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	- Jumlah Laptop yang diadakan - Jumlah Printer yang diadakan	- 3 Unit - 2 Unit	45,950,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	- Jumlah Laptop yang diadakan - Jumlah Printer yang diadakan	- 3 Unit - 2 Unit	46,409,500	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Laporan Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	179,420,500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Laporan Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	181,214,705	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Bulan Tagihan Air (PDAM), PLN, dll yang dibayarkan	12 Bulan	28,420,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Bulan Tagihan Air (PDAM), PLN, dll yang dibayarkan	12 Bulan	28,704,705	
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	151,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	152,510,000	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Dokumen Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	177,988,760	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Dokumen Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	178,985,288	

a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pesisir Selatan	- Jumlah Bulan Operasional Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas - Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	- 12 Bulan - 4 Unit	99,652,760	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pesisir Selatan	- Jumlah Bulan Operasional Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas - Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	- 12 Bulan - 4 Unit	100,649,288	
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	3,300,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	3,300,000	
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehab	1 Unit	75,036,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehab	1 Unit	75,036,000	
B.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara	85%	90,744,572	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara	85%	327,967,944	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	4 Dokumen Laporan	90,744,572	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	4 Dokumen Laporan	327,967,944	

a.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	90,744,572	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	327,967,944	
C.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Pemahaman Politik kalangan Masyarakat/aparatur Daerah serta Terciptanya Stabilitas politik Pemerintahan yang Kondusif di Daerah	85%	1,125,087,631	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Pemahaman Politik kalangan Masyarakat/aparatur Daerah serta Terciptanya Stabilitas politik Pemerintahan yang Kondusif di Daerah	85%	1,210,751,453	

1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pesisir Selatan	Laporan Dokumen Kegiatan Prumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5 Dokumen	1,125,087,631	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pesisir Selatan	Laporan Dokumen Kegiatan Prumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5 Dokumen	1,210,751,453	
----	---	---------------------------	---	-----------	---------------	---	---------------------------	---	-----------	---------------	--

a.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	- Jumlah Partai Politik yang diverifikasi untuk Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai - Jumlah Partai Politik yang Mendapat Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik	- 13 Parpol - 13 Parpol	1,095,806,271	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	- Jumlah Partai Politik yang diverifikasi untuk Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai - Jumlah Partai Politik yang Mendapat Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik	- 13 Parpol - 13 Parpol	1,109,608,573	
----	--	---------------------------	--	----------------------------	---------------	--	---------------------------	--	----------------------------	---------------	--

b.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Monev di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Dokumen Laporan	29,281,360	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Monev di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Dokumen Laporan	101,142,880	
D.	PROGRAM PEMBERDAYA-AN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Hasil Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85%	20,026,930	PROGRAM PEMBERDAYA-AN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Hasil Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85%	178,643,860	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Monev Ormas/LSM yang Mendapat Pembinaan	4 Dokumen Laporan	20,026,930	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Monev Ormas/LSM yang Mendapat Pembinaan	4 Dokumen Laporan	178,643,860	

a.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Komunikasi dengan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS/LSM)	12 Bulan	20,026,930	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Komunikasi dengan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS/LSM)	12 Bulan	178,643,860	
E.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA-NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85%	86,080,192	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA-NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85%	494,990,439	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Pesisir Selatan	Telaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	12 Bulan	86,080,192	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Pesisir Selatan	Telaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	12 Bulan	494,990,439	

a.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	- Jumlah ASN dan Siswa yang Mengikuti Tes Urine untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba - Jumlah Dana Hibah Bantuan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba kepada Polres Pessel - Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat - Jumlah Siswa yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat SLTA dan Nagari - Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI)	- 300 Siswa - 1 Paket - 200 Orang - 72 Siswa per Kecamatan - 1 Kegiatan	38,535,636	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	- Jumlah ASN dan Siswa yang Mengikuti Tes Urine untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba - Jumlah Dana Hibah Bantuan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba kepada Polres Pessel - Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat - Jumlah Siswa yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat SLTA dan Nagari - Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI)	- 300 Siswa - 1 Paket - 200 Orang - 72 Siswa per Kecamatan - 1 Kegiatan	399,901,327	
----	---	---------------------------	---	---	------------	---	---------------------------	---	---	-------------	--

b.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah	4 Dokumen Laporan	47,544,556	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah	4 Dokumen Laporan	95,089,112	
F.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Hasil Capaian Kondusifitas Pemerintah dalam Bidang Perlindungan Masyarakat	85%	1,184,585,916	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kabupaten Pesisir Selatan	Persentase Hasil Capaian Kondusifitas Pemerintah dalam Bidang Perlindungan Masyarakat	85%	676,439,832	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Konflik Sosial yang Tetangani Melalui Koordinasi Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	4 Dokumen Laporan	1,184,585,916	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Konflik Sosial yang Tetangani Melalui Koordinasi Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	4 Dokumen Laporan	676,439,832	

a.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	- Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Rapat-Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) - Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Rapat-Rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing - Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Rapat-Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pimpinan Daerah (TKDPD) - Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Rapat-Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) - Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan dari Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial - Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan untuk Penelitian	- 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 21 Rekomendasi - 100 Rekomendasi	1,056,776,968	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	- Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Rapat-Rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing - Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Rapat-Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pimpinan Daerah (TKDPD) - Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Rapat-Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) - Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan dari Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial - Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan untuk Penelitian	- 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 21 Rekomendasi - 100 Rekomendasi	601,399,936	
----	---	---------------------------	--	---	---------------	---	---------------------------	---	---	-------------	--

b.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Monev di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Dokumen Laporan	127,808,948	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Monev di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Dokumen Laporan	75,039,896	
----	--	---------------------------	--	-------------------	-------------	--	---------------------------	--	-------------------	------------	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan yang diinginkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 didasarkan kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu secara umum adalah ***Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat di Dukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional***. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berperan dalam mewujudkan arah kebijakan yaitu pembinaan politik dalam negeri melalui strategi :

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi
- 2) Peningkatan kapasitas partai politik
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilukada dan pemilu
- 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan
- 5) Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi Pancasila
- 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa
- 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial

Dalam mewujudkan arah kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyusun 1 program yaitu Program Pembinaan Politik dan pemerintahan Umum dengan sasaran program dan indikator kinerja program yaitu :

- a. Meningkatkan kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi
- b. Simpul strategis pembumian Pancasila berjalan optimal

- c. Aparatur pusat dan daerah, tim terpadu penanganan konflik sosial yang mampu melaksanakan secara optimal deteksi dini dan cegah dini serta pengawasan orang asing dan lembaga asing

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berlandaskan misi yang telah ditetapkan , maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan dinamis
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkinerja tinggi

Sasaran dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Pesisir Selatan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
4. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 merupakan pedoman program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam tabel program dan kegiatan ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program dan kegiatan serta rencana tahun depan dan Prakiraan Maju Rencana. Untuk selengkapnya rincian program dan kegiatan tahun 2021 serta Prakiraan Maju Rencana tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C. 33 dibawah ini:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pesisir Selatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)													
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		Kabupaten Pesisir Selatan			Pendapatan Transfer			
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Kabupaten Pesisir Selatan		5,325,145,031	Pendapatan Transfer			5,823,059,207
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Kabupaten Pesisir Selatan	100%	2,818,619,790	Pendapatan Transfer		100%	2,934,265,679
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	6 Dokumen	30,000,000	Pendapatan Transfer		6 Dokumen	30,300,000
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang disusun	Kabupaten Pesisir Selatan	6 Dokumen	30,000,000	Pendapatan Transfer		6 Dokumen	30,300,000

8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	12 Dokumen	2,047,169,792	Pendapatan Transfer		12 Dokumen	2,096,284,540
8	01	01	2.02	01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji ASN dan CASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kabupaten Pesisir Selatan	12 Bulan	1,909,536,614	Pendapatan Transfer		12 Bulan	1,957,275,030
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honor ASN yang dibayarkan	Kabupaten Pesisir Selatan	12 Bulan	137,633,178	Pendapatan Transfer		12 Bulan	139,009,510
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	40,000,000	Pendapatan Transfer		1 Dokumen	100,000,000
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Orang	40,000,000	Pendapatan Transfer		1 Orang	100,000,000
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	7 Dokumen	298,090,738	Pendapatan Transfer		7 Dokumen	301,071,646
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	7 Unit	10,330,292	Pendapatan Transfer		7 Unit	10,433,595
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	20 Buah	11,999,690	Pendapatan Transfer		20 Buah	12,119,687
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	34 Buah	23,423,456	Pendapatan Transfer		34 Buah	23,657,691
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetak yang disediakan - Jumlah Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	- 6 Unit - 80499 Lembar	31,568,300	Pendapatan Transfer		- 6 Unit - 80499 Lembar	31,883,983
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Bacaan yang disediakan (Surat Kabar) - Jumlah Publikasi yang disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	- 3 Media - 1 Paket	10,900,000	Pendapatan Transfer		- 3 Media - 1 Paket	11,009,000
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Pelayanan Tamu	Kabupaten Pesisir Selatan	12 Bulan	19,437,000	Pendapatan Transfer		12 Bulan	19,631,370
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Pesisir Selatan	12 Dokumen	190,432,000	Pendapatan Transfer		12 Dokumen	192,336,320
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	45,950,000	Pendapatan Transfer		1 Dokumen	46,409,500

8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Laptop yang diadakan - Jumlah Printer yangg diadakan	Kabupaten Pesisir Selatan	- 3 Unit - 2 Unit	45,950,000	Pendapatan Transfer		- 3 Unit - 2 Unit	46,409,500
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	179,420,500	Pendapatan Transfer		1 Dokumen	181,214,705
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tagihan Air (PDAM), PLN, dll yang dibayarkan	Kabupaten Pesisir Selatan	12 Bulan	28,420,500	Pendapatan Transfer		12 Bulan	28,704,705
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Laporan	151,000,000	Pendapatan Transfer		1 Laporan	152,510,000
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Dokumen	177,988,760	Pendapatan Transfer		1 Dokumen	178,985,288
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Bulan Operasional Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas - Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Kabupaten Pesisir Selatan	- 12 Bulan - 4 Unit	99,652,760	Pendapatan Transfer		- 12 Bulan - 4 Unit	100,649,288
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	6 Unit	3,300,000	Pendapatan Transfer		6 Unit	3,300,000
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehab	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Unit	75,036,000	Pendapatan Transfer		1 Unit	75,036,000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara	Kabupaten Pesisir Selatan	85%	90,744,572	Pendapatan Transfer		85%	327,967,944
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	4 Dokumen Laporan	90,744,572	Pendapatan Transfer		4 Dokumen Laporan	327,967,944
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pesisir Selatan	500 Orang	90,744,572	Pendapatan Transfer		500 Orang	327,967,944

8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBA- NGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemahaman Politik dikalangan Masyarakat/aparatur Daerah serta Terciptanya Stabilitas politik Pemerintahan yang Kondusif di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	85%	1,125,087,631	Pendapatan Transfer	85%	1,210,751,453
8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Laporan Dokumen Kegiatan Prumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	5 Dokumen	1,125,087,631	Pendapatan Transfer	5 Dokumen	1,210,751,453
8	01	03	2.01	04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah Partai Politik yang diverifikasi untuk Penyaluran Bantuan Keuangan kepada kepada Partai - Jumlah Partai Politik yang Mendapat Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik	Kabupaten Pesisir Selatan	- 13 Parpol - 13 Parpol	1,095,806,271	Pendapatan Transfer	- 13 Parpol - 13 Parpol	1,109,608,573

8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Monev di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	4 Dokumen Laporan	29,281,360	Pendapatan Transfer		4 Dokumen Laporan	101,142,880
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYA-AN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYA-RAKATAN	Persentase Hasil Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Pesisir Selatan	85%	20,026,930	Pendapatan Transfer		85%	178,643,860
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Monev Ormas/LSM yang Mendapat Pembinaan	Kabupaten Pesisir Selatan	4 Dokumen Laporan	20,026,930	Pendapatan Transfer		4 Dokumen Laporan	178,643,860
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Komunikasi dengan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS/LSM)	Kabupaten Pesisir Selatan	12 Bulan	20,026,930	Pendapatan Transfer		12 Bulan	178,643,860
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA-NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Pesisir Selatan	85%	86,080,192	Pendapatan Transfer		85%	494,990,439
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Telaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Pesisir Selatan	12 Bulan	86,080,192	Pendapatan Transfer		12 Bulan	494,990,439

8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Jumlah ASN dan Siswa yang Mengikuti Tes Urine untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba - Jumlah Dana Hibah Bantuan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba kepada Polres Pessel - Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat - Jumlah Siswa yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat SLTA dan Nagari - Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI)	Kabupaten Pesisir Selatan	- 300 Siswa - 1 Paket - 200 Orang - 72 Siswa per Kecamatan - 1 Kegiatan	38,535,636	Pendapatan Transfer		- 300 Siswa - 1 Paket - 200 Orang - 72 Siswa per Kecamatan - 1 Kegiatan	399,901,327
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	4 Dokumen Laporan	47,544,556	Pendapatan Transfer		4 Dokumen Laporan	95,089,112
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Hasil Capaian Kondusifitas Pemerintah dalam Bidang Perlindungan Masyarakat	Kabupaten Pesisir Selatan	85%	1,184,585,916	Pendapatan Transfer		85%	676,439,832
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial yang Tetangani Melalui Koordinasi Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	Kabupaten Pesisir Selatan	4 Dokumen Laporan	1,184,585,916	Pendapatan Transfer		4 Dokumen Laporan	676,439,832

8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Rapat-Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) - Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Rapat-Rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing - Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Rapat-Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pimpinan Daerah (TKDPD) - Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Rapat-Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) - Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan dari Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial - Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan untuk Penelitian	Kabupaten Pesisir Selatan	- 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 21 Rekomendasi - 100 Rekomendasi	1,056,776,968	Pendapatan Transfer	- 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 4 Dokumen Laporan - 21 Rekomendasi - 100 Rekomendasi	601,399,936
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Monev di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	4 Dokumen Laporan	127,808,948	Pendapatan Transfer	Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Monev di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	75,039,896

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang. Memantau perkembangan pelaksanaan program dan kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					0	5,325,145,031	5,727,602,003					2,372,788,533					
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	2,818,619,790	3,190,850,262					270,000,000				
8	01	01	2.01		Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	30,000,000	41,756,800					0				
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 dokumen	4 dokumen	0	30,000,000	41,756,800		PENDAPATAN TRANSFER		Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.		4 dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	2,047,169,792	2,047,289,792					0				
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	21 Orang/Bulan	0	1,909,536,614	1,909,536,614		PENDAPATAN TRANSFER		Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.		21 Orang/Bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 bulan	12 Dokumen	0	137,633,178	137,753,178		PENDAPATAN TRANSFER		Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.		12 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	40,000,000	20,000,000					0			
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 orang	1 Orang	0	40,000,000	20,000,000		PENDAPATAN TRANSFER		Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.		1 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	298,090,738	313,035,890						240,000,000				
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 unit	7 Paket	0	10,330,292	10,329,250		PENDAPATAN TRANSFER		Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.		7 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 buah	1 Paket	0	11,999,690	11,990,740		PENDAPATAN TRANSFER		Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.		1 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				34 buah	4 Paket	0	23,423,456	27,995,600		PENDAPATAN TRANSFER		Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.		4 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 unit	4 Paket	0	31,568,300	31,568,300		PENDAPATAN TRANSFER		Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.		4 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				3 media	4 Dokumen	0	10,900,000	10,900,000		PENDAPATAN TRANSFER				4 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan	1 Laporan	0	19,437,000	10,545,000		PENDAPATAN TRANSFER		Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.		1 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 dokumen	4 Laporan	0	190,432,000	209,707,000		PENDAPATAN TRANSFER		Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.		4 Laporan	240,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	45,950,000	220,180,500						0		
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					75 Unit	0	0	68,737,500		PENDAPATAN TRANSFER		Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.		75 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 unit	40 unit	0	45,950,000	151,443,000		PENDAPATAN TRANSFER		Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.		40 unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	179,420,500	179,420,500						30,000,000		
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	1 Laporan	0	28,420,500	28,420,500		PENDAPATAN TRANSFER				1 Laporan	30,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	0	151,000,000	151,000,000		PENDAPATAN TRANSFER				1 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	177,988,760	369,166,780						0		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 bulan	4 Unit	0	99,652,760	91,180,780		PENDAPATAN TRANSFER	Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.		4 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 unit	10 unit	0	3,300,000	3,300,000			Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.		10 unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	2 unit	0	75,036,000	274,686,000		PENDAPATAN TRANSFER	Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.		2 unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	0	90,744,572	120,971,072					85 Persen	172,852,444		
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan rasa kesadaran dalam mewujudkan kecintaan berbangsa dan bernegara	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	0	90,744,572	120,971,072					85 Persen	172,852,444		
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan					500 orang	0	90,744,572	120,971,072	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	0	500 orang	172,852,444	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemahaman politik dikalangan masyarakat/aparatur daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	0	1,125,087,631	1,125,087,631			85 Persen	1,137,057,271				
8	01	03		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kebijakan pemerintah dalam penanganan perkembangan politik di daerah	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	0	1,125,087,631	1,125,087,631			85 Persen	1,137,057,271				
8	01	03		2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah jumlah partai politik yang diverifikasi untuk penyaluran Bantuan Keuangan kepada partai Jumlah partai politik yang mendapat hibah bantuan keuangan partai politik				13 parpol 13 parpol	26 orang 13 parpol	0	1,095,806,271	1,095,806,271	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	0	26 orang 13 parpol 13 parpol	1,073,967,539	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil monev di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi poltik di daerah Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai poltik, pemilihan umum/pemilhan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah			4 dokumen laporan	4 dokumen laporan 20 Laporan	0	29,281,360	29,281,360	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Prioritas 2 Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.	0	4 dokumen laporan 20 Laporan	63,089,732	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Persentase hasil Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasikemasyarakatan	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	0	20,026,930	20,026,930				85 Persen	53,695,148			
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pembinaan dan peningkatan kualitas komunikasi dengan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS/LSM)	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	20,026,930	20,026,930				12 Bulan	53,695,148			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen hasil monev Ormas/LSM yang mendapat pembinaan Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah				4 dokumen laporan	4 dokumen laporan 1 Laporan	0	20,026,930	20,026,930	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.	0	4 dokumen laporan 1 Laporan	53,695,148	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	0	86,080,192	86,080,192				85 Persen	354,648,314			
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	86,080,192	86,080,192				12 Bulan	354,648,314			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Lapaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah ASN dan siswa yang mengikuti tes urin untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba Jumlah dana hibah bantuan penanganan penyalahgunaan narkoba kepda Polres pesisir selatan Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah Jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika tingkat SLTA dan Nagari pelaksanaan upacara peringatan hari anti narkoba internaional (HANI)				300 siswa 1 paket 200 orang 72 siswa per Kecamatan 1 Kegiatan	300 siswa 1 paket 200 orang 500 orang 72 siswa per Kecamatan 1 Kegiatan		0	38,535,636	38,535,636	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.	0	300 siswa 1 paket 200 orang 500 orang 72 siswa per Kecamatan 1 Kegiatan	281,858,582	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen/laporan hasil monev di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan daerah Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah				4 dokumen laporan	4 dokumen laporan 8 Laporan	0	47,544,556	47,544,556	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	0	4 dokumen laporan 8 Laporan	72,789,732	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase hasil capaian Kondusifitas Pemerintah dalam bidang Perlindungan Masyarakat	persen		persen	85 persen	85 persen	0	1,184,585,916	1,184,585,916				85 persen	384,535,356			
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang tetangani melalui koordinasi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional	konflik		konflik	4 konflik	4 konflik	0	1,184,585,916	1,184,585,916				4 konflik	384,535,356			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen/laporan hasil rapat-rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM) Jumlah dokumen/laporan hasil rapat-rapat Koordinasi Pemantauan Orang Aing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Jumlah dokumen/laporan hasil rapat-rapat koordinasi Tim Kewaspadaan dini Pimpinan Daerah (TKDPD) Jumlah dokumen/laporan hsil rapat-rapat forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dari Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan untuk penelitian				4 Kdokumen laporan 4 dokumen laporan 4 dokumen laporan 4 dokumen laporan 4 dokumen laporan 21 rekomendasi 100 rekomendasi	4 Kdokumen laporan 4 dokumen laporan 4 dokumen laporan 4 dokumen laporan 60 orang 21 rekomendasi 100 rekomendasi	0	1,056,776,968	1,056,776,968	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	0	4 Kdokumen laporan 4 dokumen laporan 4 dokumen laporan 4 dokumen laporan 60 orang 21 rekomendasi 100 rekomendasi	227,863,892	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen/laporan hsil monev di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah JUmlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah				4 dokumen laporan	4 dokumen laporan 4 Dokumen	0	127,808,948	127,808,948	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e- government dan kemudahan investasi.	0	4 dokumen laporan 4 Dokumen	92,156,732	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
TOTAL												0	5,325,145,031	5,727,602,003						2,308,273,801		

BAB V

PENUTUP

Dalam dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta *stakeholder* dalam pelaksanaan rencana kerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh pemangku kepentingan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Dokumen Rencana Kerja 2022 ini sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 serta untuk mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan demi menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR